

tengah, daerah perbukitan terletak pada bagian timur dan barat, dan kawasan pantai berada di sebelah selatan.

b. Pembagian Administratif

Kabupaten Bantul meliputi 17 kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan. Beberapa desa yang berada di Kabupaten Bantul yang dibagi berdasarkan statusnya yakni desa pedesaan (*rural area*) serta desa perkotaan (*urban area*).

Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas yakni 55,87 km² sedangkan jumlah desa dan pedukuhan terbanyak berada di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan tujuh puluh dua pedukuhan.

Berdasarkan RDTRK dan Perda tentang batas wilayah kota, status desa bisa dibagi sebagai desa pedesaan dan perkotaan. Secara universal, jumlah desa yang tergabung dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang merupakan dalam kawasan pedesaan sebanyak 34 desa.

Tabel 2.1

Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan di Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Duseun	Luas (Km²)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87

12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	504,47

Sumber: Website Pemkab Bantul, 2017

2. Kondisi Sosial dan Budaya

Kondisi sosial budaya di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Kepadatan penduduk secara geografis menunjukkan jumlah penduduk yang berada pada suatu daerah dalam tiap kilometer persegi.

Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penduduk serta tingkat kepadatan penduduk geografis tertinggi terletak di Kecamatan Sewon, Banguntapan dan Kasihan sedangkan yang tingkat kepadatan penduduk dengan geografis rendah berada di Kecamatan Dlingo, Pajangan, dan Pleret.

3. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bantul

a. Visi

Visi Kabupaten Bantul pada tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

b. Misi

Misi Kabupaten Bantul pada tahun 2016 hingga 2021 adalah sebagai berikut:

1). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien serta bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

- 2). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 3). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- 4). Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- 5). Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- 6). Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

B. Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

a. Sejarah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik, bersih maka diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan terpercaya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Oleh karena itu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul sebagai perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul diharuskan dapat membuat suatu Rencana Strategi (Strategic Plan) serta laporan pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal ini dapat diwujudkan apabila Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian mempunyai Rencana Strategis lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan dan selalu diadakan review terhadap sasaran, indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul ke depan.

Penyusunan Laporan Akunstabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja), adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan manifestasi dari semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah berikutnya. penyusunan Laporan Akunstabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir , dan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

b. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang berkaitan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. visi harus berkaitan erat kemana instansi ini mau dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Berkaitan dengan hal tersebut maka visi dinas koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian kabupaten bantul adalah :

“PRODUK BANTUL MENJADI PRODUK UNGGULAN INDONESIA”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi diharapkan seluruh pegawai seluruh dinas koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian kabupaten bantul mengetahuinya, memahaminya, menanamkan benar-benar dalam hatinya masing-masing, melaksanakan dengan penuh tanggungjawab, komitmen tinggi, loyalitas yang senantiasa dijaga, profesional terhadap tugas, tanggungjawab, dinas dapat di tunaikan secara maksimal. Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian yaitu :

1. Mewujudkan koperasi yang mandiri untuk kesejahteraan anggota
2. Mewujudkan industri yang berdaya saing, berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan kreatifitas, daya saing produk UKM dan penguatan kelembagaan KUKM
4. Mewujudkan sarana dan insfrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri yang berwawasan lingkungan.

c. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tujuan dinas KUKMP antara lain:

1. Mewujudkan Daya Saing Koperasi Dan UMKM Dan Fasilitas Pembiayaan.
2. Menumbuh Kembangkan Perlindungan Kewirausahaan UMKM, Mewujudkan Kemitraan Dan Meningkatkan Kelembagaan KUKM.
3. Peningkatan Kualitas SDM Produk Komoditas Unggulan Daerah.
4. Mewujudkan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Industri Yang Berwawasan Lingkungan Dan Meningkatkan Permanfaatan Energi Untuk Industri.

d. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul antara lain:

1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi

2. Meningkatkan Produktifitas Kelembagaan KUKM.
3. Meningkatkan Industri Daerah.
4. Meningkatnya Penunjang Sarana Dan Prasarana Ekonomi Kerakyatan Dan Tercakupnya Kebutuhan Energi Untuk Industri.

e. Strategi, Kebijakan, Program Dan Indikator Kerja

Definisi strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Menengah dan Perindustrian, untuk dijadikan pedoman yang wajib dipatuhi, dilaksanakan dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, yaitu :

1. Strategi

Penumbuhan, penguatan dan pengembangan dalam rangka mendorong UMKM menjadi pilar ekonomi di kabupaten bantul sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri.

2. Kebijakan

1. Peningkatan Kelembagaan
2. Peningkatan KUKM Naik Kelas
3. Peningkatan Kualitas SDM Dan Produk
4. Standarisasi Produk Industri Dan Pemenuhan Kebutuhan Energi,

3. Program dan kegiatan

Berdasarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dibebankan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemelihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

f. Akuntabilitas Kinerja

Menejemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya , yaitu akunstabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akunstabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Koperasi Usaha Kecil

Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul untuk membangun akuntabilitas kerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan PK Dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

g. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Tupoksi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian. Struktur organisasi dinas koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian kabupaten bantul, terdiri dari:

A. Kepala Dinas : Drs.Sulistiyanto, M.Pd

B. Sekretaris Dinas : Dra. Annihayah,M.Eng

1. Kasubag Umum Dan Kepegawaian : Murniati Wismandari, AP,MM

2. Kasubag Program : Siti Sumiyati, S.AP
 3. Kasubag Keuangan Dan Aset : Sri Pangestuti, SE,MM
- C. Kepala Bidang Koperasi : Besari Setyowati,SE,MAP
1. Kasi Kelembagaan : Surono, BA
 2. Kasi Pengawasan : Dewi Nurharjanti, SE, M.SI
- D. Kepala Bidang UMKM : Juwahir, SE,MM
1. Kasi Pemberdayaan : Eny Kurnia Prihatini, SE
 2. Kasi Pengembangan : Haryana, SIP
- E. Kepala Bidang Produk Industri : Ir. Suryono, M.Si
1. Kasi Pengembangan Produksi Fungsional : Galuh Hajeng Fitria, SSTP
 2. Kasi Pengembangan Produk Pangan : Ir. Suprihadi, MMA
- F. Kepala Bidang Sarana Dan Infrastruktur Industri : Tri Murdianani, SE,MM
1. Kasi Pengembangan Sarana Infrastuktur Dan Industri : Drs. Agus Suharja
 2. Kasi Standarisasi Industru Dan ESDM : RE. Haryana S A, SH